



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIAN ROHMAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM**
3. NHK : **882721**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/85 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **118.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. LAINNYA, LONDON TAXI SEPEDA LIPAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **96.150.000**

D. SURAT BERTHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **36.844.745**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.650.994.745**



III. HUTANG

Rp. 750.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 900.994.745

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.